

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

RIANA WULANDARI ANANTO

C. 100 110 219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

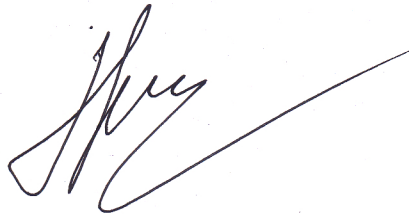
HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U)

Pembimbing II

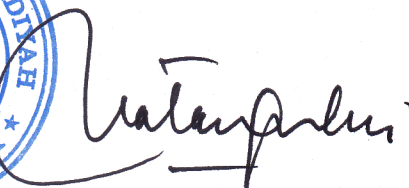


(Aristya Windiana P, S.H., LL.M)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.,)

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Riana Wulandari Ananto
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
rianawulandari001@gmail.com

ABSTRAKSI

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut. Antara lain dengan menggunakan hukum agama, hukum perdata, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya.

Kata kunci : Gugatan pembagian harta bersama, Pembagian harta bersama menurut Hukum Adat Jawa, dan Akibat hukum setelah pembagian harta bersama.

ABSTRACT

The distribution of joint matrimonial property in marriage has always been a crucial thing from the consequences of divorce. Since both husband and wife will fight each other over the distribution of matrimonial property during the marriage. Marriage Act does not regulate bluntly on how to divide the portion of each spouses of the matrimonial property. But in the Marriage Act, apparently gives leeway about which and what law will be applied in resolving the dispute over the distribution of matrimonial property to the husband and wife who were divorced. Such as, by using religious law, civil law, adat law, or any other applicable laws.

Keywords: Claim distribution of joint matrimonial property, distribution of joint matrimonial property according to the Customary Law of Java, and the legal consequences after the distribution of joint matrimonial property.

PENDAHULUAN

Dalam suatu perkawinan, dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.²

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.³

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal 4.

² *Ibid.*,

³ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 38.

menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya.⁴

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.⁵

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.Cit.*, hal 166.

⁵ H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 29.

⁶ *Ibid.*, hal 93.

Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁷

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai? (2) Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai. (2) Untuk mengetahui akibat setelah dilakukannya pembagian harta bersama.

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian. (2) Dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian. (3) Dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para

⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal 189.

keluarga, khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat dari perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁹ Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu.¹⁰ Penelitian ini menggambarkan secara jelas objek yang diteliti yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.¹¹

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 118.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal 93.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 35.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres. Hal.74

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan menganalisa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. (2) Data Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode kualitatif, metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Suami-Isteri Setelah Bercerai

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum pula. Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama (gono-gini). Tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut

hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung.

Pada Pasal 37 UU Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-isteri, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹²

Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk isteri. Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian).¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang bernama Bapak Kun Maryoso. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama (gono-gini). Beliau mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama (gono-gini) haruslah mengacu pada ketentuan Undang-

¹²Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*, hal 189.

¹³Suwatno, 2010, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro, hal 52.

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat, atau perturan lain yang berlaku.

Hal pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah pada saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini Hakim haruslah bisa menggali dan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Antara lain *pertama*, yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat memang benar pernah menjalin sebuah hubungan suami-isteri sah dan telah dinyatakan putus oleh Pengadilan karena suatu perceraian. *Kedua*, apakah Penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, yaitu terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan terjadinya perceraian. Pembuktian bisa dilakukan dengan menggunakan bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, dan sumpah.¹⁴

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN. Ska tentang pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat yang bernama Yenny Tjiamudjaja yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, melawan Tergugat yang bernama Budi Santosa yang juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Dalam hal ini Penggugat mengaku mempunyai hak atas harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 15 November 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

¹⁴ Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 23 Desember 2014, pukul 14:00 WIB.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan dan apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan Penggugat bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dapat diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Akta perkawinan No. 0284/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No perkara: 104/Pdt.G/2009/PN. Ska yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian No. 0026/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Benar selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono-gini), yaitu: (a) Sebuah mobil merk Isuzu Panther tahun 2003, No Polisi AD 8560 EF, warna biru; (b) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dari Sertifikat hak milik No. 1042 yang terletak di Nusukan Lor, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, seluas kurang lebih 132 M² ($\frac{1}{2}$ bagian adalah harta asal dari Yenny Tjiamudjaja, in casu Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta bersama Yenny Tjiamudjaja dan Budi Santosa), gambar situasi tanggal 11 Juli 1990, tertulis Nama pemegang haknya 1. YENNY TJIAMUDJAJA 2. BUDI SANTOSA suami Nyonya YENNY TJIAMUDJAJA, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen; (c) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dari Sertifikat hak milik No. 739 yang terletak di Nusukan

Lor, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, seluas kurang lebih 147 M2 ($\frac{1}{2}$ bagian adalah harta asal dari Yenny Tjiamudjaja, in casu Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta bersama Yenny Tjiamudjaja dan Budi Santosa), gambar situasi tanggal 18 Januari 1984, tertulis Nama pemegang haknya 1. YENNY TJIAMUDJAJA 2. BUDI SANTOSA suami Nyonya YENNY TJIAMUDJAJA, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen;

Karena harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka atas harta bersama tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menurut hukum masing-masing berhak atas separohnya atas harta bersama, oleh karenanya harta bersama tersebut haruslah dibagi dua; Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Apabila pembagian harta bersama secara innatura sulit dilaksanakan, maka tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1042 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 739 masing-masing terletak di Nusukan Lor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas tanah terurai dalam posita gugatan, haruslah dijual lelang, yang hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat; dalam hal ini Penggugat mendapat bagian $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan riancian $\frac{1}{2}$ bagian dari harta asal ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama, sedangkan Tergugat mendapat bagian penjualan lelang sebesar $\frac{1}{4}$ bagian sebagai bagian Tergugat dari harta bersama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama tersebut adalah cukup beralasan menurut hukum adat jawa. Sebagaimana menurut hukum adat jawa, harta bersama dikenal dengan harta gono-gini. Apabila terjadi suatu

perceraian maka harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yang masing-masing suami-isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Sehingga karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Akibat Hukum Setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Setelah dibacakannya putusan tentang pembagian harta bersama (gono-gini) Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN. Ska dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menyatakan bahwa menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut yang masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian. Dengan dibacakannya putusan tersebut, maka akan timbul akibat-akibat hukum atas pembagian harta bersama tersebut, karena suatu perbuatan hukum tentunya juga akan memberikan suatu akibat hukum pula.

Berdasarkan hasil wawancara, apabila gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan sudah diputus oleh Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusannya jelas tertulis menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, yang masing-masing berhak setengah bagian. Dengan demikian, maka kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat (bekas suami dan bekas isteri) harus melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Tetapi jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi putusan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Bapak Kun Maryoso, mengatakan bahwa akibat hukum yang timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan pembagian antara

Penggugat dan Tergugat, maka akibat hukumnya adalah harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Maka baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa menggunakan/menikmati harta benda tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai akibat hukum yang timbul setelah dilakukannya pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara terhadap Bapak Kun Maryoso, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum atas pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut dalam putusan Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN.Ska adalah *pertama* para pihak baik penggugat maupun tergugat harus mau melaksanakan secara sukarela sesuai dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, yaitu pelaksanaan putusan secara paksa dengan bantuan polisi. *Kedua* harta bersama yang telah dibagi, menjadi sah atau mutlak menjadi miliknya masing-masing. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa menggunakan/menikmati harta benda tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai. Hakim merumuskan pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta

yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memeriksa perkara Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama tersebut adalah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat Jawa. Sebagaimana menurut hukum adat Jawa, harta bersama dikenal dengan harta gono-gini. Apabila terjadi suatu perceraian maka harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yang masing-masing suami-isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Sehingga karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan putusan yang intinya amarnya berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat dan Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, yang masing-masing berhak ($\frac{1}{2}$) setengahnya.

Kedua, akibat hukum setelah dilakukan pembagian harta bersama (gono-gini). Akibat hukum yang timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa menggunakan/menikmati harta benda tersebut.

Saran

Pertama, bagi para pihak yang bersengketa baik penggugat dan tergugat. untuk penggugat, dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) sebaiknya harus dipersiapkan secara matang, terutama mengenai bukti-bukti yang nantinya akan diajukan di dalam sidang pemeriksaan untuk dapat

memperkuat atau membuktikan dalil gugatannya. karena dalam hal ini untuk dapat dikabulkannya gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) oleh majelis hakim, penggugat harus bisa membuktikan semua dalil-dalil gugatannya. selanjutnya untuk tergugat, apabila gugatan penggugat dikabulkan majelis hakim maka pihak tergugat harus bersifat kooperatif dan bersedia dengan sukarela untuk membagi harta bersama (gono-gini) tersebut dengan penggugat, tanpa harus dilakukan eksekusi.

Kedua, bagi Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) akibat dari perceraian, harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Ketiga, bagi seluruh lapisan warga masyarakat secara umum, dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) akibat dari perceraian. Sehingga untuk kedepannya terutama bagi pasangan suami-isteri yang mengalami perceraian untuk bisa mendapatkan hak-haknya yaitu mendapatkan bagian atas harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama perkawinan, dapat meminta untuk dilakukannya pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut secara damai terlebih dahulu. Namun apabila ternyata secara damai tidak bisa terlaksana, maka dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) ke Pengadilan Negeri.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Latif, H. M. Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahmud, Marzuki Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Surjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Suwatno, 2010, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro.

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan